

GOVERNMENTALITY DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR BALI

**Ni Luh Putu Ening Permini¹, I Kadek Dede Junaedy², Made Dewi
Wahyuni³, Ni Luh Komang Cantika Rahayu Dinata⁴, Desak Putu Niken
Isma Putri⁵**

*Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia^{1,2,4,5}
Universitas Bali Internasional, Denpasar, Indonesia³
E-mail: ening_permini@unr.ac.id¹*

ABSTRAK

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan telah menjadi isu krusial di Bali, salah satu tujuan wisata terkenal di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pariwisata telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, penerapan pemerintahan yang berlandaskan etika lingkungan dan inklusi sosial menjadi strategi penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan sekaligus melestarikan identitas budaya Bali. Penelitian ini mengkaji implementasi governmentality dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali. Melalui partisipasi masyarakat dan konsultasi publik, pemerintah Bali mengintegrasikan masukan dari masyarakat lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan industri pariwisata dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Etika lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pengelolaan pariwisata, dengan peraturan yang ketat untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Hasil implementasi pemerintah Governmentality menunjukkan dampak positif. Pariwisata Bali menjadi lebih berkelanjutan dengan pemantauan lingkungan yang ketat dan penegakan peraturan. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, memastikan manfaat pariwisata didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat. Pelestarian budaya juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pariwisata melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami implementasi governmentality dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali. Dimaksudkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan di masa depan.

Kata Kunci: *governmentality, kebijakan, pariwisata*

ABSTRACT

Sustainable tourism management has become a crucial issue in Bali, one of the most popular tourist destinations in Indonesia. The rapid growth of tourism has had negative impacts on the environment and local culture. Therefore, the implementation of governance based on environmental ethics and social inclusion is an important strategy in managing sustainable tourism while preserving Balinese cultural identity. This study examines the implementation of governmentality in

sustainable tourism management in Bali. Through community participation and public consultation, the Balinese government integrates input from local communities, academics, and tourism industry stakeholders in tourism decision-making. Environmental ethics is the main focus in tourism management, with strict regulations to protect natural resources and the environment. The results of the implementation of governmentality show positive impacts. Balinese tourism becomes more sustainable with strict environmental monitoring and enforcement of regulations. This increases local community involvement in the tourism industry, ensuring that tourism benefits are distributed to all levels of society. Cultural preservation is also a major concern in tourism policy through the involvement of local communities in decision-making. This study makes a significant contribution to understanding the implementation of governmentality in sustainable tourism management in Bali. It is intended for the government and tourism stakeholders to achieve the right balance between sustainable tourism growth, cultural preservation, and environmental protection in the future.

Keywords: *governmentality, policy, tourist*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi sektor ekonomi yang penting bagi Bali, menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, dan kemajuan ekonomi. Namun, pertumbuhan pariwisata yang pesat juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip governansi yang tepat menjadi kunci dalam mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Segala permasalahan yang timbul dalam perkembangan pariwisata belakangan ini khususnya di Bali membuat pentingnya pemerintah untuk menentukan arah kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pariwisata di Bali dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip governansi dapat membantu mencapai pariwisata berkelanjutan yang menghargai nilai budaya dan pelestarian

lingkungan. Membahas konsep kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan pariwisata di Bali, maka fokus utama akan diberikan pada peran pemerintah dalam mencapai keberlanjutan pariwisata, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, perlu dipertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan memberikan beberapa contoh praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata di Bali.

Implementasi prinsip-prinsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Bali, pulau ini telah mengalami pertumbuhan pariwisata yang pesat. Popularitas Bali sebagai destinasi pariwisata telah menarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia, mengakibatkan peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Pertumbuhan

pariwisata ini berdampak positif bagi perekonomian Bali dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak positif ini juga diiringi dengan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan dan budaya lokal. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berarti peningkatan konsumsi sumber daya alam seperti air, energi, dan lahan. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat wisata juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem alam dan pencemaran lingkungan. Selain itu, lonjakan pariwisata juga dapat memberikan tekanan pada aspek sosial dan budaya, mengubah pola hidup masyarakat lokal, serta menghadirkan tantangan bagi pelestarian nilai-nilai budaya tradisional.

Governmentality merujuk pada pendekatan tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas pengelola pariwisata untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan pariwisata. Konsep ini melibatkan penggunaan regulasi, kebijakan, norma-norma, dan insentif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pariwisata, seperti keberlanjutan, pelestarian budaya, dan

kesejahteraan masyarakat. Inklusi sosial adalah konsep yang mendasari partisipasi dan pemberdayaan seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat dari pembangunan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, inklusi sosial menjadi kunci untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Pentingnya inklusi sosial dalam pengambilan keputusan pariwisata terletak pada beberapa hal yakni, pengakuan terhadap nilai budaya lokal yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata memungkinkan pengakuan nilai budaya lokal dan pelestarian warisan budaya. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata akan membantu mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya dan memperkuat identitas masyarakat. Serta dukungan dan legitimasi dimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata memberikan dukungan dan legitimasi bagi program-program pariwisata yang dilaksanakan. Masyarakat yang merasa terlibat akan lebih menerima dan mendukung upaya-upaya pengelolaan pariwisata.

KAJIAN PUSTAKA

Governmentality

Konsep *Governmentality* pertama kali diperkenalkan oleh Michel Foucault dalam kuliahnya di College de France pada akhir 1970-an. Secara etimologis,

governmentality berasal dari kata *government* dan *mentality*, yang secara sederhana diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak dalam mengelola

Masyarakat (Foucault, M. & C. Gordon, & P. Miller). *Governmentality* mengacu pada cara-cara Dimana pemerintah atau aktor-aktor kekuasaan lainnya mengarahkan perilaku Masyarakat tidak hanya melalui hukum atau kebijakan formal, tetapi juga melalui Teknik, strategi, dan rasionalitas tertentu yang membentuk dan mengarahkan Tindakan individu dan kelompok.

Governmentality adalah seni pemerintahan yang mencakup mekanisme, prosedur dan strategi untuk mengelola populasi melalui pembentukan norma, diskursus dan praktik sosial. Dalam konteks modern, *governmentality* tidak terbatas pada Tindakan pemerintah semata, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai actor seperti swasta, Masyarakat dan organisasi non-pemerintahan dalam mempengaruhi dan mengatur perilaku kolektif (Esmark, A).

Kajian ini mengeksplorasi penerapan konsep *governmentality* dalam praktik pengawasan, khususnya dalam kerangka pemikiran panoptik yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Dalam konteks ini, audit internal dipahami sebagai instrumen manajerial yang secara strategis digunakan untuk membentuk kesadaran individu agar secara sukarela melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri (Hanif dkk). Fungsi audit internal tidak hanya bersifat administratif, melainkan turut membentuk pola perilaku karyawan yang secara tidak langsung menunjukkan bagaimana kekuasaan

bekerja melalui mekanisme diskursif dalam organisasi. Pemaknaan ini kemudian diperluas untuk merumuskan posisi auditor internal sebagai agen pencegahan dalam sistem manajemen risiko. Konsep *governmentality* yang diadaptasi dari teori Foucault, memungkinkan auditor internal menilai tingkat kesadaran dan kontrol diri dari pihak yang diaudit (*auditee*), yang dalam praktiknya menjadi bagian penting dari sistem pengendalian yang dapat mengarahkan subjek pada keteraturan perilaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi mendasar yang digunakan auditor internal guna menjaga serta membangun kepercayaan dari *auditee* terhadap kredibilitas proses audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman dan makna yang muncul dari praktik audit internal dalam konteks relasi kekuasaan dan pengendalian organisasi. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa pihak *auditee* menunjukkan kecenderungan persepsi yang skeptis terhadap peran dan fungsi yang dijalankan oleh auditor internal. Kecurigaan tersebut berdampak pada terbatasnya kolaborasi serta rendahnya tingkat dukungan yang diberikan oleh *auditee* terhadap pelaksanaan proses audit internal. Hal ini terjadi karena audit internal sering kali dipandang bukan sebagai mekanisme peningkatan mutu, melainkan lebih sebagai bentuk pengawasan yang dianggap

mengganggu ritme kerja dan kestabilan operasional harian organisasi.

Penelitian lainnya yang menganalisis hubungan yang ganjil antara praktik lain, upaya mengamankan kepentingan penduduk asli, Upaya pengendalian angka kelahiran diimplementasikan melalui pengenalan kebijakan ‘norma empat anak’ yang secara strategis dirancang sebagai bagian dari sistem pengaturan demografi. Kebijakan ini juga disertai dengan narasi pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya dalam konteks menjaga keberlangsungan sistem penamaan tradisional masyarakat Bali, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan program Keluarga Berencana Krama Bali. (Pringle, R). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan historisitas permasalahan tersebut. Guna terwujudnya tujuan tersebut, *research* ini spesifik menerapkan dua perspektif teoritis: *Governmentality* dan *Nativisme*. Perspektif pertama berfungsi untuk menyelidiki rasionalitas spesifik di balik dikeluarkannya kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali dan memahaminya sebagai cara pemerintah memproduksi subjek yang dapat diatur; sedangkan perspektif kedua digunakan untuk menganalisis bagaimana subyek pemerintahan dibentuk melalui kategorisasi kelompok penduduk asli (orang ‘asli’ Bali) dan kelompok pendatang (pendatang),(I Putu Rai Sukmaning Wahyu)

Penelitian oleh (Hani Oktavia Trianahadi) Kemiskinan merupakan

persoalan yang bersifat universal dan dapat ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Soekarwo pada periode 2014–2019 menginisiasi sebuah program bertajuk Jalin Matra sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Tulisan ini berfokus pada dinamika pelaksanaan program tersebut, khususnya dalam konteks hubungan antar aktor yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang muncul antara lain menyangkut ketidaktepatan penyaluran bantuan kepada pihak yang semestinya menerima, sebagaimana disoroti oleh sejumlah anggota DPRD, serta adanya indikasi pemangkasan dana bantuan oleh pemerintah desa. Untuk menganalisis fenomena ini, digunakan pendekatan Teori *Governmentality* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault. Teori ini menyoroti bentuk kekuasaan yang berbasis pada prinsip kebebasan, yang diwujudkan melalui praktik pemberdayaan dan relasi kekuasaan yang bersifat positif, karena menekankan kesetaraan dalam interaksi antar pelaku tanpa dominasi satu pihak atas yang lain. Dalam konteks ini, praktik kekuasaan dapat diamati melalui relasi yang terjalin selama implementasi program Jalin Matra. Peneliti menilai bahwa pendekatan pemberdayaan yang diusung dalam program ini sejalan dengan prinsip-prinsip *governmentality*, di mana kekuasaan tidak dijalankan secara koersif, melainkan melalui

pembentukan kapasitas dan kolaborasi antar aktor yang setara.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik kekuasaan dijalankan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam merespons isu perubahan iklim melalui kebijakan adaptasi yang dirancang. Dengan menggunakan perspektif governmentality dari Michel Foucault, kajian ini menelaah bentuk rasionalitas politik, penerapan teknologi, pembentukan identitas, serta peran lembaga-lembaga yang bekerja di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumentasi kebijakan yang relevan. Temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa pemerintah Kota Pekalongan membangun narasi diskursif yang mendorong individu dan komunitas terdampak untuk mengambil tanggung jawab utama dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Program-program seperti Kampung

Iklim dan pendampingan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah maupun pihak swasta menjadi sarana utama dalam mentransfer pengetahuan adaptasi. Proses ini berlangsung dalam kerangka depolitisasi dan teknokratisasi, di mana pengetahuan yang digunakan dibentuk oleh logika rasional dan teknologi modern. Akibat dari pendekatan tersebut adalah munculnya beban baru pada komunitas lokal, yang diminta untuk mengandalkan solidaritas sosial serta keahlian lokal dalam menjalankan tanggung jawab adaptasi.

Dengan demikian, kebijakan adaptasi perubahan iklim yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pekalongan tidak sepenuhnya bersifat komprehensif dan terpusat, melainkan lebih menunjukkan pola kekuasaan yang dijalankan dari kejauhan (*rule at a distance*), melalui pelimpahan tanggung jawab secara halus kepada masyarakat lokal yang dikonstruksi sebagai subjek yang mampu mengatur dirinya sendiri (Nurhhidayatullah).

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai isu yang dikaji secara faktual dan sistematis. Metodologi ini dimanfaatkan guna mengurai serta menggambarkan data yang berkaitan dengan praktik

governmentality dalam konteks pengelolaan pariwisata berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diwujudkan dalam bentuk narasi, visual, dan sebagian data numerik yang dianalisis untuk mengungkap

pandangan subjektif, kesan naratif, maupun makna mendalam dari respons individu yang terlibat. Data ini mencakup kata-kata, kutipan kalimat, dan citra visual yang relevan dengan konteks penelitian. Sementara itu, data kuantitatif mengacu pada informasi yang disajikan dalam bentuk angka, seperti statistik jumlah penduduk, data tenaga kerja, dan berbagai angka lainnya yang mendukung analisis. Kedua jenis data ini dipadukan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika kekuasaan dan strategi pengelolaan dalam pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut (Sugiyono). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data primer sebagai sumber utama informasi. Data tersebut diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang menjadi objek atau responden penelitian. Informasi ini dikumpulkan melalui teknik penggalan data seperti wawancara mendalam maupun melalui respons yang diberikan oleh partisipan terhadap instrumen kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang autentik dan kontekstual terhadap realitas yang sedang diteliti (Umar Husein). Sumbernya yaitu lokasi penelitian dan informan seperti dari pemilik, pekerja, pengguna pada hotel, restoran, villa, tempat seni dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Gianyar.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari

sumber utamanya, lalu diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti tabel dan diagram, sehingga informasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah melalui proses pengolahan, data ini bertransformasi menjadi data sekunder, yakni data yang sudah siap digunakan karena telah mengalami penyusunan dan klasifikasi oleh pihak lain. Contoh dari data sekunder ini mencakup struktur organisasi, uraian tugas, jumlah pegawai, laporan resmi, serta berbagai bentuk dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus kajian. Dalam rangka memperoleh data yang mendalam dan kaya makna, digunakan teknik wawancara secara terstruktur dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara lebih luas dari para informan. Wawancara dipahami sebagai proses interaksi dua arah antara pewawancara dan narasumber, di mana terjadi pertukaran informasi dan pandangan melalui dialog yang terarah, dengan tujuan membangun pemahaman yang bermakna atas suatu tema tertentu. Adapun pemilihan narasumber dilakukan melalui metode purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu agar individu yang dipilih benar-benar memiliki relevansi dan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gianyar.

Pendekatan ini diyakini dapat memberikan data yang lebih akurat dan representatif terhadap kondisi lapangan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Governmentality* dalam Konteks Pengelolaan Pariwisata:

Dalam konteks pengelolaan pariwisata, penerapan *governmentality* melibatkan berbagai strategi dan prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Beberapa aspek penerapan *governmentality* dalam pengelolaan pariwisata meliputi:

a. Regulasi dan Kebijakan:

Pemerintah Kabupaten Gianyar menerapkan peraturan daerah (perda) dan kebijakan teknis yang mengatur dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata dengan contoh implementasinya pada perda tentang perlindungan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan sampah khususnya di Kawasan wisata seperti Ubud, Tegallalang dan Goa Gajah. Pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan juga sangat rutin dijalankan untuk mencegah ahli fungsi lahan pertanian menjadi bangunan wisata yang massif dan merusak lingkungan, serta diterapkannya zonasi wilayah agar Pembangunan akomodasi wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) salah satunya dengan

pembatasan Pembangunan hotel di daerah Ubud dan sekitarnya.

Selain itu Regulasi terkait izin Pembangunan dan zonasi pariwisata, Kabupaten Gianyar melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mewajibkan IMB yang khusus mengatur kriteria bangunan ramah lingkungan sesuai dengan nilai budaya lokal, proses perizinan yang mewajibkan analisis dampak lingkungan bagi usaha pariwisata berskala besar, penentuan zonasi wisata agar pengembangan pariwisata tidak tumpang tindih dengan zona konservasi budaya dan lingkungan, seperti di area pura tirta empul dan lainnya.

b. Partisipasi Publik:

Implementasi *governmentality* dalam pengelolaan pariwisata juga melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum partisipatif, konsultasi, dan mekanisme partisipatif lainnya, sehingga masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan pariwisata dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pariwisata berkelanjutan. Partisipasi public di Kabupaten Gianyar merupakan bagian penting dari *governmentality* dalam mengelola pariwisata yang berbasis Masyarakat dan berkelanjutan. Partisipasi ini melibatkan berbagai

elemen Masyarakat, termasuk desa adat, kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*), komunitas seni dan budaya, pelaku UMKM, hingga generasi muda. Beberapa contoh bentuk partisipasi publik yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Gianyar: Forum Partisipatif atau rapat dan musyawarah desa wisata, forum ini digunakan untuk menentukan arah pengembangan desa wisata seperti jenis atraksi yang dikembangkan misalnya pementasan tari barong, pertunjukan burung hantu di petulu yang selalu melalui musyawarah desa dengan mengikutsertakan perbekel (kepala desa), bendesa adat, kelompok sadar wisata, kelompok pengerajin dan seni budaya lokal untuk menyepakati setiap kegiatan atau perubahan yang akan dilakukan. Selain itu Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pariwisata secara rutin menggelar sosialisasi dan konsultasi public terkait kebijakan pariwisata, contoh konkretnya adalah konsultasi public terkait penataan Kawasan wisata tegallalang rice terrace agar akses pengunjung tidak merusak jalur irigasi bagi petani (subak).

c. Penggunaan Teknologi dan Informasi:

Governmentality dalam pengelolaan pariwisata juga mencakup penggunaan teknologi dan informasi untuk memantau, mengelola, dan mempromosikan

pariwisata. Teknologi informasi, seperti sistem manajemen destinasi dan pemasaran digital, dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan pariwisata dan mencapai target pemasaran yang lebih efektif. Kabupaten Gianyar telah mulai menerapkan sistem digital untuk memantau dan mengelola destinasi wisata meskipun dalam tahap pengembangan dan bertahap. Sistem ini dirancang untuk memotivasi jumlah kunjungan wisatawan melalui tiket online dan sistem pencatatan digital di beberapa objek wisata unggulan seperti : *monkey forest ubud* melalui penerapan *e-ticketing* dan sensor penghitungan pengunjung, pada Objek wisata Goa Gajah dan Taman Nusa juga sudah mulai menggunakan pendataan pengunjung secara digital untuk manajemen data wisata, serta dengan pemasangan CCTV dan kamera pengawas di destinasi utama tujuannya untuk memantau perilaku wisatawan dan mencegah Tindakan wisatawan yang melanggar norma adat atau membahayakan lingkungan.

d. Kolaborasi antara Pihak Terkait:

Implementasi *governmentality* juga melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi ini dapat membantu

membangun sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan pariwisata berkelanjutan. Dalam mengelola sektor pariwisata, Kabupaten Gianyar juga menerapkan model kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, Masyarakat lokal, Lembaga non-pemerintah (NGO), dan akademisi. Salah satu contoh kegiatan yang contoh kegiatan kolaborasi pemerintah daerah dengan Masyarakat lokal yaitu penyelenggaraan festival budaya lokal, festival budaya Gianyar, ubud festival yang secara langsung mendapat berbagai dukungan dari komunitas seni, adat bahkan seluruh pemuda Gianyar. Implementasi antara pemerintah dengan sektor swasta (pelaku usaha hotel, restoran, travel agent) yaitu melalui Kerjasama dalam promosi Bersama destinasi wisata seperti promosi paket wisata yang menggabungkan akomodasi hotel dengan atraksi wisata lokal, kuliner lokal, seni budaya serta kerajinan lokal Masyarakat Gianyar. Contoh implemetasi kolaborasi dengan Lembaga non-pemerintah dan komunitas peduli lingkungan yaitu focus pada pelestarian budaya, lingkungan dan pariwisata berkelanjutan seperti keberadaan Yayasan Begawan yaitu Yayasan khusus pelestarian burung Jalak Bali di payangan, kelompok Bank Sampah dan komunitas pengelola

sampah berbasis Masyarakat yang bekerjasama untuk pengelolaan sampah wisatawan di objek wisata seperti objek wisata Tegallalang dan *Monkey forest*.

Penerapan *governmentality* dalam pengelolaan pariwisata bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan governansi yang tepat, diharapkan pariwisata di Bali dapat berkembang secara berkelanjutan sambil memelihara keunikan budaya dan keindahan alam pulau tersebut.

Berikut data perkembangan pariwisata Bali hingga September 2024



Sumber : <https://bali.bp.go.id>

Etika Lingkungan dalam Pengelolaan Pariwisata

Etika lingkungan memiliki peran krusial dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali. Etika lingkungan mencakup nilai-nilai moral dan normatif yang mengarahkan perilaku manusia terhadap lingkungan alam. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, etika lingkungan menggarisbawahi

pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan alam, sehingga destinasi pariwisata dapat terjaga untuk dinikmati oleh generasi masa depan. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memerlukan penerapan regulasi dan kebijakan lingkungan yang kuat. Regulasi dan kebijakan ini berperan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, serta memastikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata minimal. Beberapa aspek regulasi dan kebijakan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata meliputi:

a. Konservasi Sumber Daya Alam:

Regulasi lingkungan harus mengatur konservasi sumber daya alam seperti air, hutan, dan lahan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Pembatasan akses dan penggunaan sumber daya alam yang terbatas dapat membantu menjaga ketersediaan dan kualitasnya untuk keberlanjutan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Edaran Bupati mewajibkan pengelola destinasi wisata, terutama desa wisata, hutan wisata, dan Sungai untuk menjaga kelestarian alam seperti : perlindungan Kawasan hutan lindung, konservasi flora

dan fauna lokal pada program pelestarian burung kokokan di Desa Petulu serta herabilitasi kritis tersering yang alami di sawah Tegallalang.

b. Pengendalian Pencemaran dan Limbah:

Regulasi dan kebijakan lingkungan juga harus mengatasi masalah pencemaran dan pengelolaan limbah dari industri pariwisata. Pengelolaan limbah yang baik dan pengendalian pencemaran menjadi penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air di destinasi pariwisata. Kabupaten Gianyar menerapkan aturan pengelolaan sampah melalui perda pengelolaan sampah yang mewajibkan objek wisata dan hotel untuk memiliki tempat pengelolaan sampah (TOS3R), Bank sampah dan sistem pengolahan air limbah (IPAL). Salah satu contohnya pada objek wisata *Monkey Forest Ubud* sudah dilengkapi pengelolaan sampah dan IPAL untuk menjaga kebersihan Kawasan wisata.

c. Zonasi dan Penataan Ruang:

Regulasi penataan ruang dan zonasi harus diterapkan untuk mengatur pembangunan infrastruktur pariwisata. Zonasi yang tepat akan membantu dalam membatasi

pembangunan di kawasan sensitif, seperti kawasan pesisir, hutan, atau situs budaya bersejarah, guna melindungi lingkungan dan nilai budaya. Kabupaten Gianyar melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengatur zonasi pariwisata, kawasan konservasi dan Kawasan budidaya sehingga Pembangunan pariwisata tidak merusak lingkungan atau situs budaya. Salah satu contohnya penetapan zona wisata budaya di Ubud dan zona konservasi di daerah Payangan dan taro.

d. Sertifikasi Lingkungan:

Implementasi sertifikasi lingkungan, seperti sertifikasi ramah lingkungan untuk akomodasi atau restoran, dapat mendorong praktik pariwisata berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Pemerintah kabupaten Gianyar mendorong semua pengelolapariwisata untuk memiliki sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment*) dan sertifikat *Green Hotel* untuk hotel-hotel yang ramah lingkungan. Beberapa hotel dan villa di Ubud yang sudah mengantongi sertifikat CHSE sebagai operasional pasca pandemi.

d. Edukasi dan Kesadaran

Lingkungan:

Regulasi dan kebijakan juga harus melibatkan edukasi dan kesadaran lingkungan kepada wisatawan, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dapat membantu mengubah perilaku dan praktik yang lebih berkelanjutan. Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar secara rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya pariwisata keberlanjutan, baik kepada pelaku usaha, Masyarakat lokal maupun wisatawan. Contohnya sering dilaksanakan kampanye bebas plastic padi destinasi wisata, pelatihan pengelolaan sampah oleh Pokdarwis serta edukasi wisata ramah lingkungan kepada pengunjung.

Implementasi regulasi dan kebijakan lingkungan yang efektif dalam pengelolaan pariwisata akan membantu menjaga keberlanjutan alam dan budaya di Bali, sambil memastikan pariwisata tetap menjadi sumber keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Etika lingkungan harus menjadi pijakan utama dalam setiap

kebijakan dan keputusan yang diambil agar pariwisata di Bali dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak terlibat.

Pentingnya Inklusi Sosial dalam Pengembangan Pariwisata:

Inklusi sosial adalah konsep yang mendasari partisipasi dan pemberdayaan seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat dari pembangunan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, inklusi sosial menjadi kunci untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Pentingnya inklusi sosial dalam pengembangan pariwisata terletak pada beberapa hal, yakni:

- a. Pengakuan Nilai Budaya Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata memungkinkan pengakuan nilai budaya lokal dan pelestarian warisan budaya. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata akan membantu mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya dan memperkuat identitas masyarakat.
- b. Dukungan dan Legitimasi: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata memberikan

dukungan dan legitimasi bagi program-program pariwisata yang dilaksanakan. Masyarakat yang merasa terlibat akan lebih menerima dan mendukung upaya-upaya pengelolaan pariwisata.

- c. Pengurangan Ketimpangan: Inklusi sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan sektor pariwisata. Partisipasi mereka dalam program-program pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata juga berarti memberdayakan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan destinasi pariwisata mereka sendiri. Pemberdayaan ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan.

Implementasi *Governmentality* dalam Pengelolaan Pariwisata di Bali

Implementasi *governmentality* dalam pengelolaan pariwisata di Bali mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam *governmentality*, di mana warga lokal berperan aktif dalam

perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan pariwisata. Keterlibatan ini difasilitasi melalui forum dialog atau konsultasi publik yang mendorong kontribusi langsung demi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan partisipasi mereka, kebijakan dan program pariwisata akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga meningkatkan efektivitas dan penerimaan dari program-program tersebut. Implementasi *governmentality* juga melibatkan penerapan etika lingkungan dan regulasi pariwisata yang ketat. Etika lingkungan dalam pengelolaan pariwisata berfokus pada nilai-nilai moral yang menekankan pelestarian lingkungan alam dan keberlanjutan ekosistem. Regulasi pariwisata, di sisi lain, mencakup aturan-aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif pariwisata. Dengan menerapkan etika lingkungan dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah atau otoritas pengelola pariwisata di Bali diharapkan segera membuat kebijakan preventif, guna mencegah hal negatif seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan pemakaian sumber daya alam secara berlebihan. Regulasi pariwisata yang ketat juga membantu memastikan agar kegiatan pariwisata dijalankan dengan mematuhi standar lingkungan yang tinggi, menjaga keseimbangan alam, dan melindungi kekayaan lingkungan Bali.

Dampak Implementasi *Governmentality* dalam Keberlanjutan Pariwisata

Salah satu dampak positif utama dari implementasi *governmentality* dalam pengelolaan pariwisata di Bali adalah tercapainya keberlanjutan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan regulasi dan kebijakan lingkungan yang ketat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pariwisata dapat dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Pengelolaan sumber daya alam dan penerapan praktik ramah lingkungan akan membantu menjaga keaslian dan keindahan alam Bali, sehingga destinasi pariwisata tetap menarik bagi wisatawan dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Implementasi *governmentality* juga membawa dampak positif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dan dukungan komunitas terhadap pariwisata berkelanjutan. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program inklusi sosial, masyarakat lokal merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi pariwisata mereka. Menurut Zubaedi dukungan dan partisipasi masyarakat memperkuat identitas budaya lokal, meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata, serta menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi keberhasilan pariwisata.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun implementasi *governmentality* memiliki dampak positif, ada beberapa tantangan dan hambatan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Tingkat Kesadaran menjadi tantangan utama dalam implementasi *governmentality* karena dalam memastikan tingkat kesadaran dan pemahaman yang memadai dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal. Kesadaran tentang pentingnya governansi dalam pengelolaan pariwisata dan peran setiap individu dan kelompok dalam proses ini harus dijaga dan ditingkatkan.

Koordinasi Antar lembaga dimana implementasi *governmentality* melibatkan banyak pemangku kepentingan dan lembaga yang berbeda. Koordinasi yang baik antar lembaga dan pihak terkait perlu dijaga sehingga terhindar dari konflik kepentingan dan lain sebagainya. Minimnya SDM hingga anggaran menjadi hambatan bagi implementasi program governansi yang komprehensif. Investasi yang tepat perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi *governmentality*, beberapa upaya perlu dilakukan diantaranya: peningkatan kesadaran melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, kesadaran tentang pentingnya governansi dalam pengelolaan pariwisata dapat ditingkatkan di kalangan semua pihak

terkait, penguatan kerjasama yang kuat antara pemerintah, pihak swasta hingga warga lokal akan membantu mengatasi kendala koordinasi dan memastikan keselarasan tujuan serta pengoptimalan sumber daya yakni optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dan finansial akan meningkatkan efektivitas program.

KESIMPULAN

Pengelolaan pariwisata di Bali melalui implementasi *governmentality* telah membawa dampak positif yang signifikan. Keberlanjutan pariwisata dan pelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam penerapan etika lingkungan dan regulasi pariwisata yang ketat. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program inklusi sosial, masyarakat lokal diberdayakan dan dukungan komunitas untuk pariwisata berkelanjutan semakin meningkat. Namun, tantangan dan hambatan tetap ada, seperti tingkat kesadaran yang perlu ditingkatkan dan koordinasi antar lembaga yang harus diperkuat. Dengan upaya mengatasi tantangan tersebut dan terus memperkuat keterkaitan antara etika lingkungan dan inklusi sosial, implementasi *governmentality* di pengelolaan pariwisata di Bali dapat semakin sukses dan berdampak positif bagi seluruh komunitas.

Melalui evaluasi yang baik terhadap keberhasilan implementasi *governmentality* dapat terus dilakukan

peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, Bali

dapat terus menjadi destinasi pariwisata yang unik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak terlibat..

DAFTAR PUSTAKA

- Esmark, A. (2018). *Limits to liberal government: An alternative history of governmentality. Administration & Society*.
- Foucault, M. (2007). *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-1978 (M. Senellart, Ed.)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Foucault, M., I. G. B., & C. Gordon, & P. Miller (Eds.). (1991). *Governmentality The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. The University of Chicago Press.
- Hani Oktavia Trianahadi. (2020). *Governmentality dalam Program Jalin Matra: Studi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan Soekarwo Periode 2014-2019 Jawa Timur*.
- Hanif, A., Fitriyah, H., & Febriansah, R. E. (2020). PERAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(2), Inpress. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2264>
- I Putu Rai Sukmaning Wahyu, I. K. P. E. (2019). *Praktik Governmentality dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali*.
- Nurhidayatullah, D. (2023). *Perubahan Iklim Sebagai Governmentality: Rezim Praktik Untuk Adaptasi Di Pekalongan*. 8(2).
- Pringle, R. (2014). *A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Umar Husein. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubaebi. (2016). *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek*. Jakarta : Prenada Media Group.